

## **ABSTRAKSI**

### **TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA DALAM PENGIRIMAN PAKET POS DI TINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Oleh  
**CUK HARIAWAN**  
**NIM: 99 840 0025**

#### **JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN**

Dalam kegiatan manusia sehari-hari selalu mempunyai kepentingan baik sendiri yang bersifat individual maupun kolektif. Salah satunya adalah kepentingan itu adalah dalam bentuk pengiriman paket pos. Dalam sehari-harinya kebutuhan yang beraneka-ragam, kebutuhan tersebut lazimnya baru dapat dipenuhi apabila ia mengadakan hubungan hukum sesama manusia. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik terhadap masing-masing pihak, pengiriman paket pos merupakan kepentingan manusia maka untuk menjamin kelangsungannya dituntut adanya perlindungan hukum. Demikian disebutkan dalam

PT. Pos Indonesia merupakan perlindungan terhadap kepentingan manusia dapat dicapai dengan membentuk suatu peraturan yang merupakan norma hukum, norma hukum diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dalam hubungan antar manusia, sehingga dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat secara layak. Pelanggaran terhadap norma hukum ini diberi akibat hukum karena pada hakekatnya hukum itu ingin menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan pengiriman paket pos mengatur hubungan antara pengirim dan P.T. Pos Indonesia. Hak dan kewajiban pengirim dan pihak P.T. Pos Indonesia bukan hanya sebagai pedoman saja tetapi harus ditaati.

Bertitik tolak dari kenyataan bahwa PT. Pos Indonesia merupakan pembantu pemenuhan kebutuhan manusia dengan menawarkan pelayanan jasa tertentu berupa pengiriman surat, dokumen, dan barang paket yang saat ini mengalami perkembangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam di dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Hak-hak dan kewajiban para pihak di dalam hal pengiriman paket pos yang di laksanakan oleh P.T Pos Indonesia.
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi di dalam pelaksanaan pengiriman paket pos yang dilaksanakan oleh PT. Pos Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan penulis lakukan dengan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah. Sedangkan studi lapangan dilaksanakan dalam bentuk wawancara dengan karyawan PT. Pos Medan.

Pembahasan pada skripsi ini penulis mulai dengan membahas tentang perjanjian pada umumnya, untuk memberikan gambaran tentang perjanjian sebagai dasar pembahasan untuk bahasan selanjutnya. Selanjutnya penulis menguraikan tentang gambaran umum tentang kantor pos, baru kemudian diikuti oleh pelaksanaan perjanjian pengiriman paket antara perseorangan dengan kantor pos.

Dari pembahasan yang penulis lakukan, maka di dapat suatu kesimpulan bahwa, setiap perjanjian terdapat pihak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sudah disepakati bersama. Dimana yang menjadi kewajiban pengirim dalam pengiriman paket pos harus dilakukan dengan sepenuh dan bertanggung jawab dan kantor pos mempunyai hak untuk membatalkan tuntutan, bila tuntutan tidak disertai dengan data-data pendukung yang lengkap.

Sebagai saran di anjurkan agar masyarakat sebagai pengguna jasa kantor pos secara umum hendaknya berhati-hati dalam pengiriman paket dalam arti kata menulis data yang lengkap bukan berarti meragukan jasa kantor pos sebagai jembatan penghubung antar sesama masyarakat dan bagi PT. Pos sendiri bila sipengirim mengalami kerugian dalam pengiriman yang disebabkan oleh kelalaian PT. Pos sendiri hendaknya bertanggung jawab dalam hal ini.